

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MELALUI ALOKASI DANA DESA DI DESA WILAMACI KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA

Kamaluddin

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, STISIP Mbojo Bima

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Melalui Alokasi Dana Desa di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima”. Masalah yang dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dari Alokasi Dana Desa di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan dari Alokasi Dana Desa di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informannya adalah staf Desa Wilamaci, Ketua dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Wilamaci, pengurus PKK, RW, RT, tokoh-tokoh masyarakat Desa Wilamaci, masyarakat Desa Wilamaci, serta masyarakat lainnya di Desa Wilamaci Kecamatan Monta. Penentuan informan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *snowball sampling*. Kemudian teknik analisis yang digunakan yaitu analisis secara deskriptif kualitatif, yang dimulai dari reduksi data, display data, dan verifikasi dan pengambilan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diungkapkan dalam penelitian ini yakni: *Pertama*, masyarakat sangat aktif dalam pertemuan/rapat, partisipasi masyarakat dalam mengajukan usulan ketika rapat berlangsung, maupun partisipasi masyarakat dalam mengusulkan program. *Kedua*, masyarakat turut ikutserta dalam pengambilan keputusan tersebut. *Ketiga*, partisipasi masyarakat yang berwujud dalam memberikan sumbangan tenaga, sumbangan material/uang, sumbangan pemikiran, dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan jadwal kerja bhakti sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka hasil yang diperoleh menjawab sudah aktif.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Pembangunan dan Dana Desa

PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak

desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) yakni mendorong peningkatan

swadaya gotong royong masyarakat desa atau budaya partisipasi. Demikian halnya, salah satu prinsip dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa didasarkan atas prinsip masyarakat berperan aktif (partisipasi) mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.

Kegiatan bagi belanja pemberdayaan masyarakat dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk: *pertama*, biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil 60% (enam puluh persen) dari 70% (tujuh puluh persen) Alokasi Dana Desa; *kedua*, bantuan untuk menunjang kegiatan Lembaga Kemasyarakatan 15% (lima belas persen) dari 70% (tujuh puluh persen) Alokasi Dana Desa; *ketiga*, bantuan kegiatan Posyandu sebesar 10% (sepuluh persen) dari 70% (tujuh puluh persen) alokasi dana desa; dan *keempat*, kegiatan pemberdayaan desa lainnya sebesar 15 % (lima belas persen) dari 70 % (tujuh puluh persen) Alokasi Dana Desa.

Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan.

Pembangunan masyarakat pedesaan adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di mana mereka mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya secara bersama (Adisasmita, 2006). Pembangunan masyarakat desa pada arah perpaduan antara pembangunan sosial ekonomi dan pengorganisasian masyarakat. Pembangunan desa pada dasarnya bersifat demokratis, yakni: dari, oleh, dan untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat seharusnya mencapai tingkat menentukan visi dan misi pembangunan

yang diprogramkan.

Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip: 1) transparansi (terbuka), 2) partisipatif, 3) dapat dinikmati masyarakat, 4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan berkelanjutan (*sustainable*) (Adisasmita, 2006).

Secara spesifik oleh Stone (Kodoatie, 2005:101), infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitas tujuan-tujuan ekonomi.

Infrastruktur merupakan faktor utama yang bisa dengan cepat mempengaruhi perkembangan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat akan cepat terdongkrak jika pembangunan infrastruktur secara ekspansif dilakukan. Namun dengan catatan, infrastruktur yang dibangun sejalan dengan potensi dan kebutuhan daerah.

Secara kasat mata, masyarakat umum memandang bahwa yang dimaksud dengan pembangunan infrastruktur adalah pembangunan jalan, jembatan, ataupun gedung-gedung yang dibangun oleh pemerintah dan menjadi fasilitas umum yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.

Infrastruktur merupakan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur adalah merupakan *public service obligation*, yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah. Keberadaan infrastruktur sangat penting bagi pembangunan, sehingga

pada fase awal pembangunan pada suatu negara hal tersebut akan dipikul sepenuhnya oleh pemerintah yang dibiayai dari APBN murni.

Pembangunan atau sistem infrastruktur adalah merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pembangunan atau sistem infrastruktur dapat dimaknai sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya *system social* dan ekonomi masyarakat (Grigg dalam Effendi (2002:48). Peranan infrastruktur adalah sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sistem sosial di dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi penting. Infrastruktur yang kurang (atau bahkan tidak) berfungsi akan memberikan dampak yang besar bagi manusia (Kodoatie, 2003). Hal tersebut berarti bahwa keberadaan sistem infrastruktur mutlak dibutuhkan di dalam berbagai jenis kegiatan.

Program pembangunan infrastruktur perdesaan, dititikberatkan penanganannya atau fokus utamanya adalah: (i) pengembangan masyarakat; (ii) pembangunan/peningkatan infrastruktur perdesaan; dan (iii) peningkatan peran stakeholder dan pemerintah daerah.

Dalam pemenuhan infrastruktur atau fasilitas publik, diperlukan investasi yang cukup besar dan pengembalian investasi dalam jangka waktu yang relatif lama. Selain itu, manajemen operasionalnya juga membutuhkan *cost* yang tinggi. Permasalahan inilah yang menjadi kendala bagi kebanyakan negara-negara berkembang dalam pemenuhan infrastruktur.

Namun kendala keterbatasan pembiayaan dari pemerintah tersebut, maka pembangunan infrastruktur perdesaan membutuhkan partisipasi

masyarakat. Pembangunan infrastruktur perdesaan dengan menggunakan program partisipatif melalui melibatkan masyarakat setempat sejak awal program. Pelibatan tersebut, diharapkan terjadinya penguatan kembali modal-modal sosial yang ada pada masyarakat, menciptakan rasa memiliki demi keberlangsungan operasional dan pemeliharaan infrastruktur sebagai sarana aksesibilitas untuk menunjang kegiatan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Program dengan pendekatan partisipatif untuk masa yang akan datang dibutuhkan beberapa kegiatan awal dan berkelanjutan, antara lain: (1) penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat, (2) mendorong penguatan modal-modal sosial yang ada pada masyarakat, dan (3) sosialisasi program dengan menggunakan berbagai media, serta (4) pemberian *reward* atau penghargaan untuk daerah sasaran program yang dianggap berhasil, seperti: alokasi program dilaksanakan secara berkelanjutan (*sustainable*), dan dapat dijadikan *pilot project* (Adisasmita, 2006).

Partisipasi masyarakat merupakan hak azasi, sehingga masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Kesempatan tersebut perlu diberikan karena tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan yang mereka inginkan. Masyarakat sendiri yang akan merasakan dan menilai apakah pembangunan tersebut berhasil atau tidak. Maka agar tujuan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah, diperlukan persepsi yang sama antar individu yang terlibat dalam pembangunan. Persamaan persepsi

diperlukan mulai dari apa yang harus ditempuh, bagaimana implementasinya, monitoring dan evaluasi. Akhirnya pendekatan partisipatif disadari mutlak diperlukan dalam mencapai keberhasilan pembangunan.

Peranserta atau partisipasi artinya mengambil bagian atau turut serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi merupakan suatu proses maka diperlukan pendekatan pendahuluan yaitu pengenalan dan sosialisasi kegiatan. Jadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terdapat dua kegiatan yang perlu dilakukan sebelum mengimplementasikan metode PRA yaitu pengenalan dan sosialisasi program.

Salah satu cara meningkatkan partisipasi masyarakat yakni melalui pendekatan kultural atau budaya. Kultur atau kebudayaan adalah perilaku berpola yang ada dalam kelompok tertentu yang anggotanya memiliki makna, simbol dan cara yang sama untuk mengkomunikasikan makna tersebut (Colletta dan Kayam dalam Y. Slamet, 1994). Unsur-unsur kebudayaan tersebut meliputi pranata atau aturan tersurat maupun tersirat dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan agama. Kebudayaan umumnya terbentuk dalam waktu yang lama dan terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari dan tercermin dalam perilaku suatu individu atau masyarakat.

Kawasan pedesaan menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal yang menghambat perwujudan kawasan permukiman pedesaan yang produktif, berdaya saing dan nyaman, termasuk di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Di antaranya: terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas; lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial; timbulnya hambatan

(*barrier*) distribusi dan perdagangan antar daerah; tingginya risiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di pedesaan; rendahnya aset yang dikuasai masyarakat pedesaan; rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana pedesaan; rendahnya kualitas SDM di pedesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah; meningkatnya konversi lahan pertanian subur dan beririgasi teknis bagi peruntukan lain; meningkatnya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat; lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan pedesaan; dan semakin menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik dengan berbagai penyebab.

Partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan proses belajar masyarakat; mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang bertanggung jawab; mengeliminasi perasaan terasing sebagian masyarakat serta; menimbulkan dukungan dan penerimaan dari pemerintah (Carter dalam Rustiningsih, 2002).

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka di dalam penulisan penelitian ini penulis dapat merumuskan masalah pokok bagaimanakah partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan pembangunan infrastruktur dari Alokasi Dana Desa di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan pembangunan infrastruktur dari Alokasi Dana Desa di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Informasi yang diperoleh melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi

bahan masukan dan konsep dasar serta sebagai bahan rujukan bagi para peneliti lain yang hendak memperdalam penelitiannya pada masalah yang sama di masa-masa mendatang dengan informan yang lebih besar lagi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah.

Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna.

Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun; dan bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada

pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995:56). Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin (1987:xiii).

Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984:3).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-baran dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Berdasarkan definisi-definisi pemberdayaan di atas, dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial

seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

2. Pengertian Masyarakat

Secara sosiologis, masyarakat merupakan makna daripada penduduk. Menurut Sapari Imam Asy'ari (1993 : 32), "Masyarakat sebenarnya juga "istilah yang bersifat abstrak" buatan manusia atau tegasnya buatan para ahli pikir, untuk menandai "wadah pergaulan hidup bersama manusia." Ia sebagai tempat persemaian dan pertumbuhan budaya manusia sebagai makhluk sosial." Di masyarakat terdapat simbol-simbol, nilai-nilai, aturan-aturan, norma-norma atau kaidah-kaidah tingkah laku yang bersifat normatif yang harus ditaati, dikembangkan atau dipertahankan, dan bahkan diciptakan oleh manusia sebagai anggota masyarakat tersebut.

Pada hakikatnya, masyarakat terdiri atas kelompok besar manusia yang relatif permanen, berinteraksi secara permanen, menganut dan menjunjung suatu sistem nilai dan kebudayaan tertentu.

Menurut P.J. Bouman sebagaimana dikutip M. Cholil Mansyur (1999 : 22) bahwa "Masyarakat ialah pergaulan hidup yang akrab antara manusia dipersatukan dengan cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan mereka."

Koentjaraningrat dalam Suparto (1987

: 116) dikemukakan bahwa "Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinue dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama."

Pengertian lain dikemukakan R. Abdussalam sebagai berikut : "Masyarakat adalah segenap manusia Indonesia baik sebagai individu/ perorangan maupun kelompok di wilayah hukum Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan serta kepentingan berbeda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda pula, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama yaitu aman, sejahtera dan bahagia dalam arti fisik, mental, dan spiritual serta berideologi Pancasila baik secara perorangan maupun kelompok" (R. Abdussalam, 1997 : 25).

Berdasarkan pada beberapa pengertian atau definisi masyarakat tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa masyarakat merupakan pengumpulan manusia yang banyak dan bersatu dengan cara tertentu oleh karena adanya hasrat-hasrat kemasyarakatan yang sama. Dengan demikian, syarat-syarat timbulnya masyarakat meliputi : harus ada pengumpulan manusia yang banyak.

3. Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang

mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Secara umum Alokasi Dana Desa (ADD) atau yang di beberapa daerah dikenal juga dengan istilah Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) atau di beberapa daerah disebut DAU Desa maupun DAU Nagari dapat diterima dan dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat desa. Dana tersebut meskipun jumlahnya masih terbatas namun telah mampu menjadi stimulan bagi pembangunan desa.

4. Pengertian Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitas tujuan-tujuan ekonomi (Stone dalam Kodoatie, 2005:101).

World Bank (1994), mendefinisikan infrastruktur dalam konteks ekonomi sebagai sebuah terminologi yang memayungi banyak aktivitas terkait "*social overhead capital*". Lebih jauh "*social overhead capital*" ini dipandang sebagai fondasi bagi peningkatan standar kehidupan, penggunaan lahan nasional secara lebih baik dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Infrastruktur, berdasarkan pengertian *Asian Development Bank* atau ADB (2009) merupakan faktor utama yang bisa dengan cepat mempengaruhi perkembangan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat akan cepat terdongkrak jika pembangunan infrastruktur secara ekspansif dilakukan. Namun dengan catatan, infrastruktur yang dibangun sejalan dengan potensi dan kebutuhan daerah.

Secara kasat mata, masyarakat umum memandang bahwa yang dimaksud dengan pembangunan infrastruktur adalah pembangunan jalan, jembatan, ataupun gedung-gedung yang dibangun oleh pemerintah dan menjadi fasilitas umum yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini dipertegas oleh Grigg (2000) bahwa sistem infrastruktur adalah merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya *system social* dan ekonomi masyarakat.

Infrastruktur merupakan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur adalah merupakan *Public Service Obligation*, yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah. Keberadaan infrastruktur sangat penting bagi pembangunan, sehingga pada fase awal pembangunan pada suatu negara hal tersebut akan dipikul sepenuhnya oleh pemerintah yang dibiayai dari APBN murni.

Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Effendi (2002:48) menyebutkan bahwa pentingnya pembangunan infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah, apabila tidak demikian

biaya yang dikeluarkan untuk penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif.

Dalam pemenuhan infrastruktur atau fasilitas publik, diperlukan investasi yang cukup besar dan pengembalian investasi dalam jangka waktu yang relatif lama. Selain itu, manajemen operasionalnya juga membutuhkan *cost* yang tinggi. Permasalahan inilah yang menjadi kendala bagi kebanyakan negara-negara berkembang dalam pemenuhan infrastruktur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Informan dipilih secara *purposive* (dengan memiliki kriteria inklusi) dan *key person*. Berdasarkan pertimbangan *purposive sampling*, maka dalam penentuan informan ini peneliti mengambil secara sengaja sebanyak 6 orang informan. Dalam usaha untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode wawancara mendalam. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi (*triangulation*). Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu dilakukan dengan penggambaran dan pemaparan secara akurat dan aktual, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang menggambarkan secara gamblang permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan masalah yang diajukan pada, maka dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan dianalisis atau dibahas

kaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dari Alokasi Dana Desa di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

1. Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur)

Dalam menyoroti berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur), paling tidak terdapat empat tahap yang menjadi arena di mana masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur). Keempat tahap yang dimaksud yaitu partisipasi pada tahap perencanaan atau perumusan keputusan; partisipasi pada pelaksanaan; partisipasi dalam menikmati hasil atau tahap pemanfaatan hasil; dan partisipasi dalam melestarikan pembangunan.

Turut terlibatnya masyarakat dalam proses perencanaan merupakan tahap pertama keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa.

Dengan berdasarkan pada paradigma baru perencanaan yaitu perencanaan partisipatif dengan visi dan misi baru yang bertujuan untuk lebih memberdayakan masyarakat, maka perencanaan tersebut benar-benar harus bersumber dan dimulai dari bawah yakni masyarakat. Dengan perkataan lain, masyarakat merencanakan pembangunan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup yang telah lama berakar budaya pada masyarakat.

Tujuan perencanaan dengan melibatkan peran aktif masyarakat pada dasarnya yakni agar dalam menyusun rencana pembangunan lebih bermutu sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan keadaan setempat; agar masyarakat merasa memiliki program atau kegiatan pembangunan di desanya sehingga lebih bersungguh-sungguh, bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan/pengembangan hasil-hasil pembangunan sarana dan prasarana fisiknya (infrastruktur); menumbuhkan dan mendorong peranserta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan yang telah disepakati bersama.

Dengan lain perkataan, untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, agar seluruh warga desa dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan, dengan kemampuan, kesempatan, dan kecepatan yang proporsional; meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap masalah, kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia; dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat menuju terciptanya pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada kekuatan masyarakat sendiri.

Pada fase atau tahap perencanaan, secara riil partisipasi masyarakat dapat berbentuk sebagai berikut : *pertama*, partisipasi masyarakat yang berwujud menghadiri pertemuan/rapat; *kedua*, partisipasi dalam mengajukan usulan ketika rapat berlangsung; dan *ketiga*, partisipasi masyarakat dalam mengusulkan program.

a. Keikutsertaan masyarakat yang berwujud menghadiri pertemuan/rapat

Untuk mendapatkan gambaran bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang berwujud partisipasi masyarakat yang berwujud menghadiri pertemuan/rapat

untuk menyampaikan atau menerima informasi di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima, akan tampak dengan jelas sebagaimana sajian wawancara berikut ini.

Hasil wawancara dengan Bapak Syahbuddin Usra sebagai Ketua RW 01 Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:

“Setiap kali ada pertemuan (rapat) yang diadakan oleh pemerintah desa saya selalu menghadirinya, karena saya tidak mau ketinggalan informasi-informasi yang dibahas dalam rapat, kegiatan semacam ini sangat bermanfaat dan berguna sekali bagi saya sendiri dalam mengembangkan keterampilan maupun keahlian yang saya miliki, terutama dalam menata pembangunan sarana dan prasarana fisik di lingkungan tempat tinggal saya” (Hasil Wawancara, Juli 2015)

Hasil wawancara lain dengan Bapak Kurniawan salah seorang tokoh masyarakat di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:

“Sebagaimana kita maklumi, di lingkungan Desa Wilamaci ini, belum lama dibentuk atau dibangun beberapa lingkungan baru. Nah, sebagai warga yang juga dianggap tokoh masyarakat, saya selalu menghadiri setiap ada pertemuan yang membicarakan tentang pembangunan lingkungan, baik pembangunan fisik, pembangunan budaya, maupun pembangunan ekonomi. Ya, selaku tokoh masyarakat, saya tetap menghadiri pertemuan di desa ini” (Hasil Wawancara, Juli 2015)

Berarti partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang berwujud partisipasi masyarakat yang berwujud menghadiri pertemuan/rapat untuk menyampaikan atau menerima informasi di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima dalam pembangunan lingkungan dikategorikan sangat aktif. Partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang

sangat penting dalam kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan proses belajar masyarakat; mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang bertanggung jawab; mengeliminasi perasaan terasing sebagian masyarakat serta ; menimbulkan dukungan dan penerimaan dari pemerintah.

b. Partisipasi masyarakat dalam mengajukan usulan ketika rapat berlangsung

Di samping wujud partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yaitu dengan menghadiri pertemuan/rapat, wujud lain yakni partisipasi masyarakat dalam mengajukan usulan ketika rapat berlangsung.

Guna mendapatkan gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang berwujud mengajukan usulan ketika rapat berlangsung di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima, akan tampak dengan jelas sebagaimana sajian wawancara berikut ini.

Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin, SE sebagai Ketua LPMD di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:

“Menurut pendapat saya, setiap anggota kelompok yang mengikuti rapat sudah sangat aktif dalam hal mengajukan usul maupun memberikan saran dalam perencanaan pembuatan program kerja pembangunan sarana dan prasarana fisik atau infrastruktur. Nah, kelihatan keaktifan mereka dapat dilihat pada buku notulen rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa kami” (Hasil Wawancara, Juli 2015)

Hasil wawancara dengan Bapak Alu Munir sebagai Ketua BPD Desa Wilamaci

Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:

“Ketika pertemuan di aula desa, saya tetap mengajukan usulan dan saran dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana fisik di lingkungan desa ini. Saya sering mengusulkan tentang kriteria kelayakan sebuah pemukiman baru. Misalnya, harus aman dari bahaya bencana alam. Lingkungan yang sehat, dan mempunyai akses ke tempat bekerja dan atau berusaha. Nah, dalam perencanaan kemarin saya mengajukan tentang perbaikan lingkungan pemukiman tersebut” (Hasil Wawancara, Juli 2015)

Berarti partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan yang berwujud mengajukan usulan ketika rapat berlangsung di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima di Desa Wilamaci dalam pembangunan lingkungan dikategorikan sangat aktif.

c. Partisipasi masyarakat dalam mengusulkan program

Wujud lain partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yakni ikutsertanya dalam mengusulkan program. Guna mendapatkan gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang berwujud ikutsertanya dalam mengusulkan program di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima, akan tampak dengan jelas sebagaimana sajian wawancara berikut ini.

Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama Bapak H. Hamdinah Abdullah sekaligus sebagai peserta rapat desa di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:

“Ini yang saya saksikan ketika rapat-rapat di aula desa. Setiap anggota kelompok yang ikut rapat berhak mengusulkan program yang mereka miliki, meskipun program yang diajukan itu tidak sepenuhnya dipakai, namun

dengan adanya sistem seperti itu akan mendorong setiap anggota kelompok untuk ikutserta secara langsung dalam perumusan program yang dibuat nantinya. Ini sangat penting menurut saya” (Hasil Wawancara, Juli 2015)

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Hayati sebagai Ketua PKK Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:

“Saya dengan beberapa teman yang punya kepedulian akan masa depan lingkungan baru ini, tetap berusaha mengusulkan program. Tentu, agar lingkungan ini ke depannya menjadi lingkungan pemukiman yang tertata baik. Saya selalu mengusulkan, penentuan kawasan permukiman harus mempertimbangkan kriteria kelayakan. Contohnya, harus bebas dari masalah. Jelas dan pasti; dan terletak di kawasan pusat pertumbuhan dan dekat dengan tempat kerja atau berusaha” (Hasil Wawancara, Juli 2015)

Berarti partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang berwujud ikutsertanya dalam perumusan keputusan di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima di Desa Wilamaci dalam pembangunan lingkungan dikategorikan sangat aktif.

Alasan-alasan penggunaan pendekatan partisipatif bagi perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu: masyarakat berhak untuk ikut dan terlibat dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan mereka, berhak terlibat dalam keputusan-keputusan dan keberadaan mereka sehari-hari dan masa depan mereka; dan jika masyarakat benar-benar diberi kesempatan (dan haknya), untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan, maka pembangunan diperkirakan berlangsung lebih efektif dan efisien.

2. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pengambilan Keputusan.

Lembaga-lembaga desa yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik yang berwujud Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), PKK, Dasa Wisma, Lembaga Adat, Organisasi Pemuda, seperti Karang Taruna, Kelompencapir, Remaja Masjid, Majelis Taklim, Kelompok-kelompok Pengajian, maupun lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok lain dalam masyarakat merupakan motivator dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan, paling kurang para pengurus lembaga desa tersebut memotivasi para pengurus dan anggotanya.

Bahkan di beberapa tempat di belahan nusantara ini, justru yang didengar titah atau perintahnya adalah tokoh-tokoh desa yang bergabung dalam kepengurusan lembaga desa tersebut.

Dalam penelitian ini, berkenaan dengan partisipasi lembaga-lembaga desa terwujud beberapa kegiatan antara lain : mengajak orang bergotong royong; memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan; menjaga kondisi keamanan; dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di masyarakat.

Untuk lebih jelasnya tahap partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan akan diuraikan satu per satu berikut ini:

a. Memberikan pembobotan terhadap program

Sebagai wujud pertama partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan dalam kegiatan pembangunan yakni memberikan pembobotan terhadap program. Guna mengetahui mengenai partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan di Desa Wilamaci, maka akan tampak dengan jelas tanggapan

informan sebagaimana sajian wawancara berikut ini.

Hasil wawancara dengan Bapak Sudarmin salah seorang anggota BPD Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:

“Hemat saya, proses pengambilan keputusan, yang menyediakan kelompok kepentingan untuk berperanserta di dalamnya, dapat mengantarkan kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan mencapai saling pengertian dan penghayatan terhadap satu sama lain. Dengan demikian perbedaan kepentingan dapat dijumpai. Untuk mengefektifkan partisipasi masyarakat mutlak dibutuhkan kondisi-kondisi awal yang akurat dan kebersamaan. Nah ini pendapat saya, dan seperti inilah yang kami tempuh selama ini dalam proses pengambilan keputusan” (Hasil Wawancara, Juli 2015).

Hasil wawancara lain dengan Bapak Syamsudin Sulaiman sebagai Ketua RT 06 sekaligus peserta rapat Musrenbang di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:

“Menurut saya, perlu merumuskan syarat-syarat agar partisipasi masyarakat menjadi efektif dan berdaya guna. Misalnya, pemastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya. Informasi lintas batas itu perlu. Mengingat masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah yang dibuat manusia. Informasi tepat waktu, yaitu suatu proses peran serta masyarakat yang efektif memerlukan informasi sedini dan seteliti mungkin, sebelum keputusan terakhir diambil sehingga masih ada kesempatan untuk mempertimbangkan dan mengusulkan alternatif-alternatif pilihan. Informasi yang lengkap dan menyeluruh. Informasi yang dapat dipahami. Nah, dengan data awal seperti ini, kita bisa melakukan pembobotan terhadap setiap program pembangunan sarana dan prasarana fisik yang akan dilaksanakan di desa ini” (Hasil Wawancara, Juli 2015)

Berarti partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan dalam memberikan pembobotan terhadap program di Desa Wilamaci dinilai/dikategorikan sangat aktif.

b. Menentukan skala prioritas program

Wujud selanjutnya berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di Desa Wilamaci yakni menentukan skala prioritas program.

Untuk mengetahui mengenai kondisi partisipasi masyarakat pada tahap menentukan skala prioritas program dalam pengambilan keputusan di Desa Wilamaci, maka akan tampak dengan jelas tanggapan informan sebagaimana sajian wawancara berikut ini.

Hasil wawancara di atas, didukung pula dengan hasil wawancara dengan Bapak H. Muhtar M. Saleh sebagai Ketua RW 03 Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:

“Benar, pembangunan itu tidak mungkin dikerjakan sekaligus. Tentu kita harus menentukan skala prioritas program. Nah, ketika kami pertemuan di aula desa beberapa saat lalu, kami membicarakan itu. Misalnya, yang mendesak kita bangun adalah MCK, dan lapangan olahraga. Jadi skala prioritas. Itu juga sudah menjadi rumus baku dalam pengambilan keputusan” (Hasil Wawancara, Juli 2015)

Hasil wawancara di atas, didukung pula dengan hasil wawancara dengan salah seorang pengurus PKK yang bernama Ibu Dewi Purpitasari, S.Pd di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai berikut:

“Membangun itu, ada tahapan-tahapannya, dan kami di sini tetap menentukan skala prioritas program pembangunan. Penataan permukiman untuk satuan lingkungan permukiman harus disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang perekonomian. Nah, ini berdasarkan

ketubuhan mendesak masyarakat. Jadi kami dalam memutuskan program pembangunan fisik disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat” (Hasil Wawancara, Juli 2015)

Berarti kondisi partisipasi pengambilan keputusan di Desa Wilamaci dalam menentukan skala prioritas program di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima dinilai/dikategorikan sangat aktif.

Dengan demikian, berdasarkan kedua sub variabel tentang partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan, baik memberikan pembobotan terhadap program, menentukan skala prioritas program, maka hasil yang diperoleh rata-rata menjawab sangat aktif.

Penggalangan partisipasi itu dilandasi adanya pengertian bersama. Adanya pengertian tersebut adalah karena di antara orang-orang itu saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Dalam menggalang peranserta semua pihak diperlukan: terciptanya suasana yang bebas atau demokratis, dan terbinanya kebersamaan.

Partisipasi masyarakat merupakan proses dimana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Ditinjau dari segi kualitas, partisipasi adalah sebagai masukan kebijaksanaan, strategis, komunikasi, media pemecahan publik dan terapi sosial. Keikutsertaan masyarakat ini akan membawa pengaruh positif, dimana mereka akan bisa memahami atau mengerti berbagai permasalahan yang muncul serta memahami keputusan akhir yang akan diambil. Keterlibatan masyarakat merupakan bagian dari proses perencanaan yang dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan, aspirasi masyarakat yang terkena dampak sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat dihilangkan serta sebagai upaya para

perencana untuk memperoleh input dari masyarakat tentang segala sesuatu yang menyangkut nasib mereka.

Untuk mencapai sasaran tersebut terdapat dua elemen partisipasi yang harus dipenuhi oleh masyarakat yakni: adanya komunikasi dua arah yang terus menerus dan informasi yang berkenaan dengan proyek, program dan kebijaksanaan disampaikan dengan bermacam-macam teknik yang tidak hanya pasif dan formal tetapi juga aktif dan informal.

KESIMPULAN

Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan seperti :

1. Berkenaan dengan analisa terhadap ketiga sub variabel tentang partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan, baik partisipasi masyarakat yang berwujud menghadiri pertemuan/rapat, partisipasi masyarakat dalam mengajukan usulan ketika rapat berlangsung, maupun partisipasi masyarakat dalam mengusulkan program, maka hasil yang diperoleh menjawab sangat aktif.
2. Berkenaan analisa terhadap kedua sub variabel berkenaan dengan partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur dari Alokasi Dana Desa, baik memberikan pembobotan terhadap program, maupun menentukan skala prioritas program, maka hasilnya cukup aktif, karena masyarakat turut ikutserta dalam pengambilan keputusan tersebut.
3. Berkenaan dengan analisa terhadap keempat sub variabel partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan, baik partisipasi masyarakat yang berwujud dalam memberikan sumbangan tenaga,

sumbangan material/uang, sumbangan pemikiran, dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan jadwal kerja bhakti sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka hasil yang diperoleh menjawab sudah aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried, 1997, *Metodologi Penelitian Sosial dDalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, Idochi, dkk., 1986, *Sistem Informasi Manajemen dan Perencanaan Pembangunan Pendidikan*, Angkasa, Bandung.
- Bintarto, 1989, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Faisal, Sanapiah, 1995, *Format-Format Penelitian Sosial*, Rajawali, Jakarta.
- Moeljarto, T., 1987, *Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Tiara Wacana, Yogya.
- Rahardjo, 1999, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Slamet, Y., 1994, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Sebelas Maret University Press, Yogyakarta.
- Surjadi, 1995, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Mandar Maju, Bandung.
- Suryaningrat, Bayu, 1989, *Perumusan Kebijakanaksanaan dan Koordinasi Pembangunan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1987, *Manajemen Pembangunan*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta.